

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap tingkat penerimaan negara sektor pajak di KPP Pratama Bukittinggi untuk tahun pajak 2020 dan perubahannya untuk tahun pajak 2021, sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 yang mengatur mengenai perubahan tarif PPh Badan semula 25% menjadi 22%, serta perubahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan penerimaan negara sektor pajak untuk jangka waktu yang panjang. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan. Berdasarkan tinjauan tingkat penerimaan negara sektor pajak di KPP Pratama Bukittinggi sebagai akibat diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan dapat disimpulkan bahwa : Tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Bukittinggi untuk tahun 2020 menunjukkan angka yang cukup kecil, ditandai dengan indikator berupa jumlah penerimaan PPh Badan serta PPh Pasal 25/29 Badan yang mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, namun penerimaan pajak ini kembali mengalami kenaikan untuk tahun pajak 2021; Pada tinjauan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai akibat penurunan tarif PPh Badan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Bukittinggi menunjukkan angka yang cukup tinggi untuk tahun pajak 2020 maupun 2021. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini ditandai dengan indikator berupa jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar dan jumlah pelaporan SPT PPh Badan yang terus meningkat setiap tahun, serta jumlah tunggakan pajak Wajib Pajak Badan yang mengalami penurunan cukup signifikan untuk dua tahun terakhir.

Kata kunci: Penurunan tarif, Penerimaan pajak, Kepatuhan, Wajib pajak terdaftar, Tunggakan pajak.

Abstract

This study aims to review the level of state revenue in the tax sector at KPP Pratama Bukittinggi for the 2020 tax year and its changes for the 2021 fiscal year, as a result of the enactment of Government Regulation Number 30 of 2020 which regulates changes in the corporate income tax rate from 25% to 22%, as well as changes in the level of compliance of corporate taxpayers which have a major influence on increasing state revenue in the tax sector for the long term. The research method used to obtain and analyze the data is the literature study method and the field study method. Based on a review of the level of state revenue in the tax sector at KPP Pratama Bukittinggi as a result of the implementation of a reduction in Corporate Income Tax rates, it can be concluded that: The level of tax revenue at KPP Pratama Bukittinggi for 2020 shows a fairly small number, indicated by indicators in the form of total corporate income tax receipts and Article 25 income tax. /29 Entities that experienced a decrease from the previous year, but this tax revenue increased again for the 2021 fiscal year; In reviewing the compliance level of Corporate Taxpayers as a result of the reduction in Corporate Income Tax rates, it can be concluded that the compliance of Corporate Taxpayers in fulfilling their tax obligations at KPP Pratama Bukittinggi shows a fairly high number for the 2020 and 2021 fiscal years. the number of registered corporate taxpayers and the number of corporate income tax return reports that continue to increase every year, as well as the number of corporate taxpayers' tax arrears which has experienced a significant decline for the last two years.

Keywords: Tax rate reduction; Tax revenue; Obedience; Registered taxpayer; Tax arrears